

**Judul** : Panglima Jamin Netralitas Terjaga  
**Tanggal** : Kamis, 23 Nopember 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 4

## Panglima Jamin Netralitas Terjaga

Kerap bertugas di sekitar Presiden Jokowi. Jenderal Agus Subiyanto yang baru dilantik sebagai Panglima TNI menjamin netralitas prajurit terjaga. Sementara Ombudsman siap mengawasi netralitas ASN yang pengawasannya kini hanya mengandalkan pimpinan pemerintahan.

**JAKARTA, KOMPAS** — Dikenal sebagai sosok yang kerap berada di sekitar lingkungan Presiden Joko Widodo, sesuai dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023), Jenderal Agus Subiyanto menyatakan siap menjaga netralitas prajurit di Pemilihan Umum 2024. Untuk menjamin netralitas terjaga, Agus menyatakan, disediakan posko-posko aduan untuk melaporkan jika terdapat prajurit yang melanggar asas netralitas.

Selain prajurit, pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemilu 2024 juga memperoleh perhatian publik. Sejak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dihapus, setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah menyerahkan pengawasan netralitas ASN di pemilu kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Banyak kalangan, termasuk Ombudsman RI, menilai keberadaan PPK ini tak efektif mengawasi ASN. Bahkan, ada kekhawatiran PPK selaku pengawas internal berpotensi memobilisasi ASN dalam pemilu untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Hal ini mengingat PPK diisi oleh jabatan politik, seperti bupati, wali kota, dan menteri. Untuk itu, Ombudsman menyatakan siap mengambil alih pengawasan terhadap ASN.

Seuai dilantik, Agus menyampaikan, jabatan Panglima TNI yang kini diembarkannya tak diraih secara tiba-tiba meski ia diusulkan Presiden sebagai calon tunggal panglima TNI ke DPR, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun, saat ia belum genap satu pekan dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Persetujuan pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI dilakukan DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa (21/11).

"Kalau mau jadi KSAD harus bintang tiga yang *eligible* dan strategis. Kemudian, dari KSAD jadi Panglima TNI pernah menjabat kepala satuan angkatan. Tidak uji-ujug. Semuanya harus berprestasi juga," ujar Agus.

Selama di TNI, Agus pernah menjabat sebagai Komandan Kostrim 023/Surabaya pada 2009 ketika Jokowi masih menjabat Wali Kota Surakarta. Agus juga pernah menjabat sebagai Danrem 061 Suryakencana, Bogor, pada 2020 dengan wila-

yah tanggung jawab mencakup Istana Negara Bogor. Ia pun menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden tahun 2020-2021.

Agus menyampaikan akan mengusung netralitas meski putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu calon wakil presiden yang akan berkontestasi di Pemilihan Presiden 2024. "TNI sudah ada keridornya: sapa marga, 8 wajib TNI, sumpah prajurit. Kami selalu ke situ, ya, kepada NKRI, berdasarkan UUD 1945, Pancasila. Kami tegak lurus pada negara," ucapnya.

### Ambil alih pengawasan

Terkait dengan netralitas ASN, anggota Ombudsman RI, Robert Na Eandi Jaweng, Rabu (22/11), mengatakan, saat ini memang ada kekhawatiran bahwa pengawas internal ASN tidak menjalankan fungsinya selama Pemilu 2024. Untuk itu, Ombudsman siap mengambil alih pengawasan terhadap kepala daerah, kepala desa, dan aparat desa selama pemilu berlangsung.

"Dengan situasi sekarang, pengawas internal sulit berjalan maksimal, maka kami akan mengambil alih. Ketika pengawas internal tidak berfungsi dengan baik, atau bahkan menjadi bagian dari masalah, kami selaku pengawas eksternal siap mengawasi ASN, pejabat dan kepala daerah, kepala desa dan aparat desa, serta penyelenggara pemilu," katanya.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi perangkat desa yang tergabung dalam "Desa Bersatu" memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (*capres-cawapres*) Pruhwo Subianto-Gibran di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11). Dua pekan sebelumnya, sejumlah perwakilan asosiasi ini bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pelaksana Harian Deputy Bidang Stumbuh Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abu Subagja, di Jakarta, Rabu, mengatakan, dengan dihapusnya KASN, tugas mengawasi netralitas ASN selama Pemilu 2024 akan pindah ke PPK.

"Selain itu, ada juga satuan tugas netralitas yang terdiri dari Kementerian PAN dan RB, Ewaslu, serta Kementerian Dalam Negeri. Untuk sanksinya,

dikembalikan ke PPK masing-masing. Ada teguran lisan, sanksi moral, dan lainnya," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lingkaran Madani (Lima) Indonesia Iray Bangkuti mengatakan, PPK tak efektif menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024. "Hal yang dikeawatirkan justru pejabat pembina kepegawaian mengimunitasi, mengarahkan, dan memobilisasi pegawai ASN untuk keperluan politik ataupun nepotisme," ujarnya.

Kekhawatiran itu didasarkan karena PPK diisi oleh jabatan politik, seperti bupati, wali kota, gubernur, dan juga menteri.

Dalam praktiknya, kata Ray, PPK kerap bersikap diskriminatif. Oleh karena itu, tiga tahun lalu dibentuklah KASN yang dapat bersikap independen dan profesional dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. "Dengan dihapuskannya KASN, ini sama saja kembali ke titik semula," ujar Ray.

Untuk menjamin pengawasan berjalan, Ombudsman RI akan memperkuat perwakilan di 34 provinsi guna mengawasi kinerja ASN di seluruh daerah. Robert mengatakan, Ombudsman juga akan membuka "sua pengaduan di setiap provinsi untuk memantau empat pilar" pelayanan masyarakat, yakni ASN pejabat dan kepala daerah, kepala desa dan aparat desa, serta penyelenggara pemilu.

Ombudsman juga akan meneliti sejauh mana sikap tidak netral ASN memengaruhi dan membuka kerugian publik. Penggunaan fasilitas negara juga akan diawasi.

### Alutsista dan Papua

Dalam menjalankan tugasnya sebagai panglima, Agus juga akan menjaga profesionalitas prajurit dengan memastikan prajurit dilatih dengan baik, dilengkapi dengan baik, dan digaji layak. Untuk perlengkapan prajurit, contohnya alat utama sistem persenjataan (alutsista), akan dievaluasi kelayakannya.

Untuk Papua, ujarnya, TNI akan mengoptimalkan operasi intelijen dan teritorial demi membantu percepatan pembangunan di sana.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai, Agus adalah sosok yang bagus. Sebagai *capres* di Pilpres 2024, Mahfud percaya janji Agus menjaga netralitas TNI.

(WKM-DNA/WIL/SYA)